



**PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM
PENGADAAN PAKET PEMBANGUNAN REVETMENT DAN
PENGURUGAN LAHAN**

SKRIPSI

VIRA FAKHIRA

1910611034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN
PAKET PEMBANGUNAN REVETMENT DAN PENGURUGAN LAHAN**

VIRA FAKHIRA

1910611034

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 29 Desember 2022

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP. 198701022019031006

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.
NIK. 217121294



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Vira Fakhira

NPM : 1910611034

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket
Pembangunan Revetment Dan Pengurangan Lahan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A

Ketua

Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H

Anggota 1

Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Januari 2023

Dr. Heru Sugyono, S.H. M.H

Anggota 2

Taufiqurrahman, S.H., M.Kn.

Kaprodi

BIODATA PENULIS



N a m a : Vira Fakhira
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 27 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Anggur Ujung No.64, RT12/RW04
Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur
No. Telpon : 081284188407
Email : virafakhira@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Sugi Hartono
b. Ibu : Rosmala Syamsinar, S.Pd.

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN KDW 03 Pagi (Lulus Th 2013)
2. SMP : MTSN 7 Model Jakarta (Lulus Th 2016)
3. SMA : MAN 2 Jakarta (Lulus Th 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

-

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Vira Fakhira

N.I.M : 1910611034

Tanggal : Desember 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vira Fakhira
NIM/NPM : 1910611034
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : “Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket
Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan”

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 29 Desember 2022

Yang menyatakan,



Vira Fakhira

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah nya sehingga penulis dapat merampungkan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “**Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan**”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini bukan hanya atas kemampuan penulis sendiri, tetapi tidak terlepas dari doa, masukan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin meggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa melalai kan perintah-NYA.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugi Hartono dan Ibu Rosmala Syamsinar. Ucapan terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan semangat, mendoakan, dan membantu baik dari segi materiil dan imateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Rezeki dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada Papa dan Mama. Aamiin ya rabbal alaamiin.
3. Kakak penulis, Irfan Fauzan Pratama, Sela Syabania dan Irfan Dwi Hartono, terima kasih atas doa dan segala dukungan.
4. Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

6. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
10. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan ilmu untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
11. Teman – teman penulis, Fiqih Ramdhoni Pratama Putra, Arzetta Zahra Methania, Apriola Naftalie Dewani, Annisa Sylviana, Chindy, Sekar Almiathof, Karina Adhania yang telah bersama-sama berjuang selama menjalankan kuliah di UPN Veteran Jakarta. Terima kasih telah peduli dan saling menolong satu sama lain.
12. Dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pasti henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 29 Desember 2022



Vira Fakhira

ABSTRAK

Negara dan pelaku usaha merupakan pihak yang terkena dampak negatif dari adanya suatu persekongkolan dalam suatu tender. Kendati telah diatur dan dilarang secara eksplisit dalam UU Nomor 5/1999, masih terdapat pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dalam tender. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya persekongkolan tender dalam pengadaan paket pembangunan revetment dan pengurangan lahan di Pelabuhan perikanan Popoh serta tanggung jawab KPPU atas terjadinya praktik persekongkolan tender dalam pengadaan paket pembangunan revetment dan pengurangan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perihal Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu Putusan Nomor 25/KPPU-I/2020 perihal Dugaan Praktik Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik persekongkolan terus terjadi di sebabkan oleh faktor-faktor seperti penyelewengan kekuasaan oleh panitia tender, lemahnya pengawasan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP dan tidak adanya sanksi tegas yang dijatuhkan kepada panitia tender yang melakukan penyelewengan kekuasaan. Kemudian KPPU bertanggungjawab atas terjadinya praktik persekongkolan tender pada pembangunan revetment dan pengurangan lahan dengan melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman berupa sanksi administrative kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dalam hal ini persekongkolan tender. Kemudian KPPU juga bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dalam hal ini perkara persekongkolan tender agar terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat memperketat pengawasan dalam persaingan usaha di Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci : Persekongkolan, Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggung Jawab KPPU.

ABSTRACT

The state and business actors are parties that are negatively affected by a conspiracy in a tender. Even though it has been regulated and prohibited explicitly in Law Number 5/1999, there are still business actors who conspire in tenders. This study aims to explain how the tender conspiracy occurred in the procurement of the revetment development package and landfill at the Popoh Fishing Port and the KPPU's responsibility for the practice of tender conspiracy in the procurement of the revetment development package and landfill. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach (Statue Approach), namely Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and a case approach (Case Approach), namely Decision Number 25/KPPU-I/ 2020 regarding Alleged Practices of Conspiracy in the Tender for Procurement of Revetment Development Packages and Landfilling at the Popoh Fishing Port, Tulungagung Regency. The results of this study indicate that the practice of conspiracy continues to occur due to factors such as the abuse of power by the tender committee, weak supervision by the Government Goods and Services Procurement Policy Agency or LKPP and the absence of strict sanctions imposed on tender committees who commit abuse of power. Then KPPU is responsible for the practice of bid rigging in the construction of revetments and landfills by carrying out investigations, examinations and imposing penalties in the form of administrative sanctions to business actors who are proven to have committed violations in this case the tender conspiracy. Then KPPU is also responsible for making preventive efforts to reduce the occurrence of violations in this case the tender conspiracy case so as to create a healthy business climate in Indonesia. The government is expected to tighten supervision on business competition in Indonesia by referring to Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: Conspiracy, Procurement of Goods and Services, KPPU's Responsibilities.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Masalah.....	7
3. Sumber Data.....	7
4. Cara Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis Data.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review).....	11
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Tinjauan Teori Kepastian Hukum.....	13

2.	Teori Tanggung Jawab.....	16
C.	Tinjauan Umum.....	17
1.	Tinjauan Umum Tender.....	17
2.	Tinjauan Umum Persekongkolan Tender.....	19
3.	Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	27
4.	Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal.....	32
5.	Tinjauan Umum Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan	35
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....		38
A.	Perkara No. 25/KPPU-I/2020 Tentang Dugaan Pelanggaran Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan Di Pelabuhan Perikanan Popoh.....	38
1.	Kasus Posisi.....	38
2.	Identitas Para Terlapor.....	40
3.	Putusan Majelis Komisi No. 25/KPPU-I/2020.....	42
4.	Pertimbangan Majelis Komisi.....	43
B.	Tahap - Tahap Melakukan Tender.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....		52
A.	Terjadinya Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan Di Pelabuhan Perikanan Popoh.....	52
B.	Tanggung Jawab KPPU Atas Terjadinya Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurugan Lahan.....	57
BAB V PENUTUP.....		66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Persekongkonlan Tender Secara Horizontal.....	25
Gambar 2. 2 Persekongkolan Tender Secara Vertikal.....	25
Gambar 2. 3 Persekongkolan Tender Secara Vertikal dan Horizontal.....	26
Gambar 2. 4 Quarrystone Revetment	36
Gambar 2. 5 Interlocking Concrete-block Revetment.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	74
Lampiran 2 Bukti Cek Turnitin.....	75
Lampiran 3 Berita Acara Hasil Ujian	76
Lampiran 4 Sertifikat TOEFL	79